

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
I	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi : 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga a. Data pribadi pelamar umum pegawai b. Biodata pegawai c. Dokumen/ berkas kepegawaian PNS d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian f. Data pribadi pegawai kontrak/ non PNS	a. Psl 17 huruf h angka 1 UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP b. Psl.17 huruf h angka 1 UU no.14 tahun 2008 tentang KIP c. UU No. 14 th 2008 psl 17 huruf h d. UU No. 14 th 2008 psl 17 huruf h e. UU No. 14 th 2008 psl 17 huruf h f. UU No. 14 th 2008 psl 17 huruf h	a. Selama proses rekrutmen b.1. Selama yg bersangkutan menjadi PNS b.1. Apabila mendapat persetujuan dari ybs. c.1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS c.2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan d.1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS d.2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan e.1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS e.2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan f.1. Selama yang bersangkutan menjadi PNS f.2. Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	a. Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia b. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia c. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia d. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia e. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia f. Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	a.1. Menjaga kerahasiaan a.2. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan b.1. Menjaga kerahasiaan b.2. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan c.1. Menjaga kerahasiaan c.2. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan d.1. Menjaga kerahasiaan d.2. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan e.1. Menjaga kerahasiaan e.2. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan f.1. Menjaga kerahasiaan f.2. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan
II	Surat-surat yang bersifat rahasia	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata naskah Dinas di Prov. DIY	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
III	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

		Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa			
IV	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian
V	Kode akses (username dan password) Aplikasi, Internet/WiFi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Selama password masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
VI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.	Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal 10 Januari 2018

Sekretaris DPUPESDM DIY
Selaku PPID Pembantu

TTD

Ir. Bambang Widhyo Sadmo, MT
NIP. 19651121 199303 1 006